

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2027. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2027 menetapkan struktur anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,016 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp582,760 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp2,434 triliun. Komponen PAD meliputi pajak daerah Rp237,587 miliar, retribusi daerah Rp310,181 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp28,509 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp6,483 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,312 triliun dan transfer antardaerah sebesar Rp122,187 miliar.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,092 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp2,068 triliun, belanja modal Rp366,677 miliar, belanja tidak terduga Rp9,480 miliar, dan belanja transfer Rp647,529 miliar. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial, sedangkan belanja modal antara lain diperuntukkan bagi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya. Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit Rp75,228 miliar. Defisit direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama, yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp111,772 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp36,544 miliar. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan Rp20 miliar, penyertaan modal daerah Rp14,444 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp2,1 miliar.

Raperda juga memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melebihi pagu dalam keadaan darurat, antara lain bencana alam dan nonalam, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Keperluan mendesak mencakup kebutuhan pelayanan dasar yang anggarannya belum tersedia, belanja yang bersifat mengikat dan wajib, pengeluaran yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengeluaran yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Rincian lebih lanjut mengenai APBD dituangkan dalam 16 lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, mulai dari ringkasan APBD, rincian menurut urusan pemerintahan dan organisasi, sinkronisasi program, daftar pegawai, piutang, penyertaan modal, dana cadangan, hingga daftar pinjaman daerah.

Catatan:

- Raperda terdiri atas 19 pasal yang mengatur struktur APBD Tahun Anggaran 2027, pendapatan, belanja, pembiayaan, keadaan darurat dan keperluan mendesak, serta lampiran APBD.
- Pendapatan daerah direncanakan Rp3.016.517.845.062,00 dan belanja daerah Rp3.091.745.706.062,00 sehingga terdapat defisit Rp75.227.861.000,00.
- Defisit ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp75.227.861.000,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) direncanakan Rp0,00.
- Raperda mencantumkan 16 jenis lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Tag/Keyword: Raperda APBD 2027; APBD Kabupaten Kebumen; Keuangan Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah; Defisit Anggaran; Belanja Modal; Keadaan Darurat

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2027. DRAFT REGIONAL REGULATION ON THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2027

The Draft Regional Regulation of Kebumen Regency on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2027 establishes the regional budget structure consisting of regional revenue, regional expenditure, and regional financing. Regional revenue is planned at IDR 3.016 trillion, comprising IDR 582.760 billion in Regional Own-Source Revenue and IDR 2.434 trillion in transfer revenue. Regional Own-Source Revenue consists of regional taxes, regional levies, proceeds from separated regional assets, and other legitimate own-source revenue, while transfer revenue consists of Central Government transfers and interregional transfers.

Regional expenditure is planned at IDR 3.092 trillion, comprising IDR 2.068 trillion in operating expenditure, IDR 366.677 billion in capital expenditure, IDR 9.480 billion in contingency expenditure, and IDR 647.529 billion in transfer expenditure. The difference between planned revenue and expenditure results in a budget deficit of IDR 75.228 billion, which is to be covered by an equivalent amount of net financing. Financing receipts are planned at IDR 111.772 billion, while financing expenditures of IDR 36.544 billion include the establishment of reserve funds, regional capital participation, and regional loans.

The Draft Regulation also provides a legal basis for expenditures that have not been budgeted or exceed the established ceiling in emergency circumstances and for urgent needs. These include natural and non-natural disasters, extraordinary events, search and rescue operations, damage to infrastructure that may disrupt public services, essential basic services for which funding is unavailable, mandatory expenditures, and expenditures which, if postponed, could cause greater losses to the Regional Government and/or the community. Detailed APBD information is stipulated in 16 attachments forming an integral part of the Regional Regulation, covering the budget summary, detailed expenditure by government affairs and organizations, program synchronization, employee data, receivables, regional capital participation, reserve funds, and regional loans.

Note:

- *The Draft Regional Regulation consists of 19 articles governing the 2027 APBD structure, revenue, expenditure, financing, emergency and urgent expenditures, and APBD attachments.*
- *Regional revenue is planned at IDR 3,016,517,845,062 and expenditure at IDR 3,091,745,706,062, resulting in a deficit of IDR 75,227,861,000.*
- *The deficit is fully covered by net financing of IDR 75,227,861,000, resulting in a planned current-year budget surplus (SILPA) of IDR 0.*
- *The Draft Regulation specifies 16 attachments as integral parts of the Regional Regulation.*

Keywords: 2027 Draft APBD; Kebumen Regency Budget; Regional Regulation; Regional Finance; Regional Revenue; Regional Expenditure; Regional Financing; Budget Deficit; Capital Expenditure; Emergency Expenditure